

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PALU**

Moh. Raditya Akbar^{1*}, Mahfuzat Lamakampali², Nora Ariani³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL**Diterima:**

01-07-2026

Disetujui:

17-07-2026

Dipublikasi:

01-08-2026

Kata Kunci:

*Kinerja Organisasi; BPBD;
Penanggulangan Bencana;
Banjir; Kota Palu*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam upaya penanggulangan bencana banjir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Kepala BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pegawai BPBD, serta masyarakat yang pernah terdampak banjir. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kota Palu dalam penanggulangan bencana banjir secara umum berada pada kategori cukup baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan program mitigasi, sosialisasi kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi dalam penanganan bencana. Namun demikian, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi dukungan sumber daya diperlukan untuk meningkatkan kinerja BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Palu.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan klimatologisnya. Salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi adalah banjir, yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi serta mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan perencanaan yang baik, koordinasi yang efektif, dan kinerja organisasi yang mampu merespons berbagai ancaman bencana secara cepat dan tepat.

Kota Palu merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir. Intensitas curah hujan yang tinggi, perubahan tata guna lahan, sedimentasi sungai, serta perkembangan kawasan permukiman menjadi beberapa faktor yang meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya

penanggulangan bencana banjir tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memerlukan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, responsif, dan terkoordinasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja BPBD dipengaruhi oleh berbagai faktor. Syafril & Sulandari (2018) menemukan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, melaksanakan koordinasi, dan menjalankan program mitigasi secara konsisten. Murni & Alhadi (2019) menjelaskan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sementara itu, Grasia (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran masih menjadi kendala dalam optimalisasi kinerja BPBD. Penelitian Ramadhan & Pradana (2025) juga menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kinerja BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas program atau koordinasi antarinstansi di daerah tertentu. Penelitian yang menganalisis kinerja BPBD secara lebih komprehensif melalui berbagai dimensi kinerja organisasi sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana banjir di Kota Palu, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kinerja BPBD Kota Palu berdasarkan dimensi efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam upaya penanggulangan bencana banjir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen kebencanaan, serta menjadi masukan bagi BPBD Kota Palu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Penelitian dilaksanakan di BPBD Kota Palu yang dipilih secara purposive karena memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah yang rawan banjir. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, meliputi Kepala BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pegawai BPBD yang terkait dengan penanggulangan bencana, serta masyarakat yang pernah terdampak banjir. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2020) yang meliputi kondensasi data (data

condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diinterpretasikan menggunakan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Moeheriono (2014). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerja BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pembahasan disusun ke dalam dua bagian utama, yaitu Kinerja BPBD dan Faktor yang Memengaruhi Kinerja BPBD.

Kinerja BPBD

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas BPBD Kota Palu dinilai berdasarkan kemampuan lembaga dalam melaksanakan upaya mitigasi dan penanggulangan banjir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kota Palu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta masyarakat yang pernah terdampak banjir, diperoleh informasi bahwa BPBD telah melaksanakan berbagai program mitigasi, antara lain pemetaan wilayah rawan banjir, sosialisasi kebencanaan, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan daerah yang berpotensi mengalami banjir. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi banjir. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan, mengenali wilayah yang memiliki potensi banjir, serta mengikuti arahan pemerintah ketika terjadi kondisi darurat. Namun demikian, beberapa informan mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir sehingga masih diperlukan perluasan cakupan program.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat telah mulai tercapai, meskipun efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan pelayanan. Dengan demikian, efektivitas BPBD tidak hanya diukur dari terlaksananya program kerja, tetapi juga dari kemampuan organisasi memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Moeheriono (2014) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, keberhasilan tersebut tercermin dari pelaksanaan berbagai kegiatan mitigasi yang mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman banjir, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Syafril & Sulandari (2018) yang menunjukkan bahwa efektivitas kinerja BPBD dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melaksanakan program penanggulangan bencana secara konsisten serta didukung oleh koordinasi dan sumber daya yang memadai.

2. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, efisiensi BPBD Kota Palu dianalisis berdasarkan kemampuan lembaga dalam melaksanakan program penanggulangan banjir dengan memanfaatkan sumber daya manusia, waktu, dan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa BPBD Kota Palu telah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan mitigasi dan penanggulangan banjir. Pembagian tugas antarpegawai dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga setiap kegiatan dapat berjalan secara terkoordinasi. Selain itu, BPBD juga menjalin kerja sama dengan instansi lain ketika pelaksanaan kegiatan memerlukan dukungan personel maupun peralatan tambahan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pelayanan, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan prioritas wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan banjir lebih tinggi. Dengan kata lain, optimalisasi sumber daya yang dilakukan BPBD lebih banyak diarahkan pada penentuan skala prioritas agar program tetap dapat berjalan.

Menurut Moeheriono (2014), efisiensi tercermin dari kemampuan organisasi menghasilkan kinerja yang optimal melalui penggunaan sumber daya secara tepat guna. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BPBD menghadapi berbagai keterbatasan, lembaga tetap mampu menjalankan sebagian besar program penanggulangan banjir melalui pengelolaan sumber daya yang terarah dan penentuan skala prioritas. Kondisi tersebut juga ditemukan oleh Syafril & Sulandari (2018) yang mengemukakan bahwa keterbatasan sumber daya tidak selalu menghambat pencapaian tujuan organisasi apabila didukung oleh pengelolaan organisasi yang efektif.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menggambarkan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penanggulangan bencana, kualitas pelayanan BPBD tercermin dari mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa pelayanan BPBD Kota Palu telah menunjukkan kualitas yang cukup baik, terutama dalam pelaksanaan sosialisasi, penyampaian informasi kebencanaan, serta pendampingan kepada masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak banjir. Informan juga menjelaskan bahwa petugas BPBD memberikan pelayanan secara terbuka dan berupaya merespons kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Walaupun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemerataan layanan informasi kebencanaan dan intensitas kegiatan edukasi kepada masyarakat. Perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh pelayanan dengan frekuensi yang sama.

Menurut Moeheriono (2014), kualitas pelayanan merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja organisasi karena mencerminkan mutu layanan yang diterima masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BPBD Kota Palu telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pemerataan layanan informasi kebencanaan dan edukasi masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung temuan Syafril & Sulandari (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan BPBD dipengaruhi oleh

kesiapan sumber daya organisasi serta kemampuan memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.

4. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan kemampuan organisasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan maupun memberikan respons secara cepat terhadap situasi yang memerlukan penanganan segera. Dalam penanggulangan bencana, ketepatan waktu menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan sosialisasi, pemantauan wilayah rawan banjir, dan koordinasi antarlembaga umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informan juga menjelaskan bahwa BPBD berupaya memberikan respons secara cepat terhadap informasi mengenai potensi banjir sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi lebih awal.

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pelaksanaan kegiatan mengalami penyesuaian akibat faktor cuaca, kondisi lapangan, maupun proses koordinasi dengan instansi lain. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan tugas di lapangan dan tidak mengurangi komitmen BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan waktu BPBD Kota Palu dapat dinilai cukup baik karena sebagian besar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Temuan ini menunjukkan bahwa respons organisasi terhadap potensi bencana telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Ramadhan & Pradana (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons organisasi, terutama pada tahap pra-bencana melalui kegiatan pemantauan, koordinasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

5. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan aspek yang berkaitan dengan perlindungan terhadap petugas dalam melaksanakan tugas, terutama ketika bekerja di lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dalam kegiatan penanggulangan bencana, keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara, BPBD Kota Palu telah menerapkan prosedur keselamatan kerja bagi petugas yang terlibat dalam kegiatan lapangan. Namun demikian, beberapa informan mengemukakan bahwa ketersediaan perlengkapan keselamatan masih belum sepenuhnya memadai sehingga dalam kondisi tertentu petugas tetap menghadapi risiko ketika melaksanakan tugas penanggulangan banjir.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan kerja masih menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Perlindungan terhadap petugas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan alat pelindung diri, tetapi juga mencakup pelatihan keselamatan, kesiapan peralatan, serta dukungan operasional yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara aman dan efektif.

Menurut Moeheriono (2014), keselamatan kerja merupakan bagian dari indikator kinerja organisasi karena berhubungan dengan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kualitas hasil kerja. Oleh sebab itu, peningkatan fasilitas keselamatan kerja perlu menjadi perhatian BPBD agar risiko yang dihadapi petugas dapat diminimalkan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal.

Faktor yang Memengaruhi Kinerja BPBD

Selain dianalisis melalui indikator kinerja, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan tugas BPBD, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta dukungan anggaran. Kelima faktor tersebut berperan sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif.

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, ketersediaan personel yang memadai sangat diperlukan agar setiap tahapan penanggulangan, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi, dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa jumlah personel BPBD Kota Palu masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan dan kompleksitas potensi bencana yang harus ditangani. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mitigasi harus disesuaikan dengan kemampuan personel yang tersedia. Oleh karena itu, penentuan prioritas wilayah menjadi salah satu strategi yang dilakukan agar program tetap dapat berjalan secara efektif.

Meskipun menghadapi keterbatasan jumlah personel, hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai BPBD tetap berupaya melaksanakan tugas secara profesional melalui pembagian tugas yang jelas dan kerja sama antarbidang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan sumber daya manusia mampu mengurangi dampak dari keterbatasan jumlah personel, meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Syamsul Maarif (2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam sistem penanggulangan bencana. Ketersediaan personel yang memiliki kompetensi memadai akan menentukan keberhasilan pelaksanaan mitigasi maupun penanganan bencana. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Syafril & Sulandari (2018) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam meningkatkan kinerja BPBD.

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPBD. Peralatan operasional, kendaraan, perlengkapan keselamatan, serta sistem informasi kebencanaan merupakan bagian dari fasilitas yang mendukung efektivitas penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyampaikan bahwa BPBD Kota Palu telah memiliki berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang pelaksanaan tugas. Namun demikian, beberapa sarana operasional masih memerlukan peningkatan baik dari sisi jumlah maupun kualitas agar mampu memenuhi kebutuhan penanganan bencana yang semakin kompleks.

Keterbatasan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan di lapangan, terutama ketika BPBD harus menangani lebih dari satu lokasi kejadian dalam waktu yang bersamaan. Dalam kondisi tersebut, pemanfaatan sarana dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas penanganan sehingga pelayanan tetap dapat diberikan meskipun belum berjalan secara maksimal.

Menurut Syamsul Maarif (2012), keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas operasional masih diperlukan agar pelayanan BPBD dapat berjalan lebih optimal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Grasia et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas operasional menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

3. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana karena melibatkan berbagai instansi yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Keberhasilan penanganan bencana tidak hanya bergantung pada kemampuan BPBD, tetapi juga pada efektivitas kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antarinstansi di Kota Palu telah berjalan dengan baik. Para informan menjelaskan bahwa komunikasi antarlembaga dilakukan secara intensif, terutama ketika terjadi potensi maupun kejadian banjir. Pembagian tugas antarinstansi juga telah disesuaikan dengan kewenangan masing-masing sehingga proses penanganan bencana dapat berlangsung secara lebih terarah.

Kerja sama tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan evakuasi, distribusi bantuan, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta pengamanan wilayah terdampak. Meskipun demikian, koordinasi tetap memerlukan penguatan, terutama dalam penyelarasan data, pertukaran informasi, dan evaluasi bersama setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Temuan penelitian ini mendukung pendapat Syamsul Maarif (2012) yang menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan unsur utama dalam sistem penanggulangan bencana. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Murni & Alhadi (2019) yang menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat terjadi bencana, tetapi juga dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Kota Palu mulai menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, penyampaian informasi mengenai potensi banjir, serta dukungan terhadap berbagai program mitigasi yang dilaksanakan oleh BPBD.

Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Masih terdapat masyarakat yang belum aktif mengikuti kegiatan mitigasi maupun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Menurut Syamsul Maarif (2012), masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penanggulangan bencana. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan program mitigasi. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Ramadhan & Pradana (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi pra-bencana sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pengurangan risiko bencana.

5. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran merupakan faktor yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan BPBD melaksanakan kegiatan mitigasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyampaikan bahwa dukungan anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional BPBD Kota Palu. Keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa program harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat prioritas.

Meskipun demikian, BPBD tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui perencanaan kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai program utama tetap dapat dilaksanakan, walaupun belum seluruh rencana kegiatan dapat direalisasikan secara maksimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pelaksanaan tugas BPBD. Keterbatasan anggaran tidak hanya memengaruhi penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta perluasan program mitigasi kepada masyarakat. Temuan ini didukung oleh Grasia et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa dukungan anggaran merupakan salah satu faktor strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam upaya penanggulangan bencana banjir secara umum berada pada kategori cukup baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan berbagai program mitigasi, sosialisasi kebencanaan, edukasi masyarakat, pemantauan wilayah rawan banjir, serta respons terhadap potensi bencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. Dari aspek efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja, BPBD telah mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana banjir. Meskipun demikian, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja BPBD dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan dukungan anggaran. Koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan serta meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel, fasilitas operasional, dan dukungan anggaran masih menjadi kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program mitigasi maupun penanganan bencana banjir. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja BPBD Kota Palu tidak hanya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran, tetapi juga perlu diikuti dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan perluasan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Palu diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024*.
- Grasia, E., Kismartini, K., & Maesaroh, M. (2023). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 12(3), 178 - 192. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39807>
- Maarif, S. (2012). *Pikiran dan gagasan penanggulangan bencana di Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

- Moeheriono. (2014). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- Murni, N., & Alhadi, Z. (2019). Efektivitas Koordinasi antar Stakeholders Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 61-70. <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.151>
- Ramadhan, R. R., & Pradana, T. Y. (2025). Mitigasi Bencana Banjir di Kota Semarang yang Berfokus pada Pra Bencana. *Journal of Management and Public Policy*, 1(1), 636–652. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.50673>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Syafril, S., & Sulandari, S. (2018). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 8(1), 65–81. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i1.22698>